

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PENELITIAN, DAN HIPOTESIS

1.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Permintaan Tenaga Kerja

Teori permintaan tenaga kerja menjelaskan bagaimana perusahaan menentukan jumlah tenaga kerja yang akan digunakan dalam proses produksi. Menurut perspektif ekonomi pembangunan, permintaan tenaga kerja tidak bergantung pada faktor eksternal. Adanya kebutuhan bisnis untuk membuat barang dan jasa yang dibutuhkan pasar menyebabkan permintaan tersebut muncul. Menurut (Todaro & Smith, 2006), Permintaan tenaga kerja adalah permintaan turunan. Perusahaan mempekerjakan orang karena mereka membantu menghasilkan produk yang dapat dijual. Perusahaan akan meningkatkan produksi mereka ketika ada permintaan terhadap produk mereka, yang biasanya diikuti dengan peningkatan penggunaan tenaga kerja. Sebaliknya, ketika permintaan produk turun atau biaya tenaga kerja meningkat terlalu tinggi, perusahaan cenderung mengurangi jumlah tenaga kerja yang digunakan.

Keputusan perusahaan untuk menambah tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk tingkat upah, produktivitas tenaga kerja, teknologi produksi, dan skala output yang ingin dicapai. Selama kontribusi pekerja terhadap nilai produksi masih lebih besar daripada biaya upah yang harus dibayar, perusahaan akan menambah tenaga kerja. Namun, jika biaya tenaga kerja meningkat tanpa peningkatan produktivitas, perusahaan dapat mengurangi

perekrutan tenaga kerja atau mengganti sebagian proses produksi dengan teknologi yang lebih efisien. Teori permintaan tenaga kerja menunjukkan bahwa dinamika sektor produksi sangat memengaruhi pasar tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh kedua jumlah angkatan kerja yang tersedia dan kemampuan sektor industri untuk menciptakan lebih banyak pekerjaan. Dengan kata lain, peningkatan aktivitas industri memainkan peran penting dalam menentukan kapasitas suatu wilayah untuk menyerap tenaga kerja.

Menurut teori pasar tenaga kerja neoklasik, interaksi antara permintaan tenaga kerja perusahaan dan penawaran tenaga kerja individu menghasilkan keseimbangan pasar tenaga kerja. Struktur ini diterangkan oleh **(Sadono 2016)** yang menyatakan bahwa tingkat upah dan jumlah tenaga kerja yang digunakan ditentukan oleh mekanisme pasar.

$$MPL = \frac{\Delta Q}{\Delta L}$$

Keterangan:

MPL = Marginal Product of Labor

ΔQ = Perubahan output

ΔL = Jumlah tenaga kerja

Menurut pendekatan neoklasik, semakin banyak tenaga kerja yang digunakan dengan jumlah modal tetap, maka tambahan output yang dihasilkan cenderung menurun. Kondisi ini dikenal sebagai law of diminishing marginal product.

Dalam pasar tenaga kerja yang kompetitif, perusahaan akan mempekerjakan tenaga kerja sampai pada kondisi:

$$W = V MPL$$

Atau

$$W = P \times MPL$$

Keterangan:

W = Tingkat upah

VMPL = Nilai produk marjinal tenaga kerja

Persamaan ini menunjukkan bahwa perusahaan akan menambah tenaga kerja selama nilai tambahan produksi yang dihasilkan pekerja masih sama dengan upah yang dibayarkan.

2.1.2 Teori Upah Minimum

Kebijakan upah minimum dibuat untuk melindungi pekerja dari upah yang terlalu rendah. Pemerintah menetapkan standar upah minimum untuk memastikan bahwa pekerja memperoleh gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar mereka. Dalam kenyataannya, kebijakan ini juga merupakan bagian dari alat kebijakan ketenagakerjaan yang bertujuan untuk mengimbangi kepentingan pekerja dengan keberlangsungan bisnis. Menurut Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith dalam buku *Economic Development*, menjelaskan bahwa “Upah minimum dimaksudkan untuk memastikan bahwa pekerja menerima gaji yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.” (Todaro dan Smith 2006a).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meningkatkan kesejahteraan pekerja adalah tujuan utama kebijakan upah minimum, terutama bagi pekerja dengan upah rendah.

Di Indonesia, kebijakan upah minimum diterapkan melalui beberapa tingkatan, yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). UMP merupakan standar upah minimum yang berlaku di tingkat provinsi, sedangkan UMK ditetapkan pada tingkat kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah yang lebih spesifik. Istilah Upah Minimum Regional (UMR) sebelumnya digunakan, namun kini secara resmi telah digantikan oleh istilah UMP dan UMK sesuai dengan perkembangan regulasi ketenagakerjaan. Dalam Makroekonomi Teori Pengantar, Sadono Sukirno memberikan penjelasan serupa. Dia menyatakan bahwa upah minimum adalah tingkat upah terendah yang ditetapkan pemerintah untuk melindungi pekerja dari upah yang terlalu rendah dan menjaga standar hidup tenaga kerja (Sadono 2016). Kebijakan ini dapat berdampak pada keseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja. Jika dikaitkan dengan penelitian mengenai pengaruh UMK terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri pengolahan di Provinsi Jawa Barat, teori upah minimum membantu menjelaskan bagaimana kebijakan upah dapat memengaruhi keputusan perusahaan untuk mempekerjakan tenaga kerja. Di wilayah dengan tingkat UMK yang lebih tinggi, perusahaan dapat menghadapi masalah dalam penyerapan tenaga kerja jika mereka menilai biaya tenaga kerja menjadi terlalu tinggi, tetapi dalam kondisi industri

pengolahan yang kompetitif, perusahaan yang memiliki tingkat UMK. kebijakan upah minimum juga berkaitan dengan kondisi perekonomian secara makro yang tercermin dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Peningkatan PDB nasional menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang umumnya diikuti oleh peningkatan aktivitas produksi dan permintaan tenaga kerja. Dalam kondisi tersebut, pemerintah cenderung menyesuaikan kebijakan upah minimum untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan kemampuan perusahaan dalam menyerap tenaga kerja. Pendekatan yang digunakan lebih difokuskan pada tingkat regional melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), khususnya pada sektor industri pengolahan, karena variabel tersebut lebih mencerminkan aktivitas ekonomi yang secara langsung berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja di tingkat kabupaten/kota.

- Upah minimum nominal merupakan besaran upah yang ditetapkan pemerintah dalam bentuk angka uang yang diterima pekerja tanpa memperhitungkan perubahan harga barang dan jasa. Dalam nilai ini kebijakan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang ditetapkan setiap tahun. Namun, besaran nominal tidak menggambarkan daya beli pekerja karena tidak mempertimbangkan tingkat inflasi yang terjadi di suatu wilayah.
- Upah minimum riil menunjukkan kemampuan upah dalam memenuhi kebutuhan hidup pekerja setelah disesuaikan dengan tingkat harga atau

inflasi. Gambaran yang lebih akurat mengenai kesejahteraan tenaga kerja karena mencerminkan daya beli sebenarnya. Upah riil tidak mengalami peningkatan yang signifikan, bahkan dapat menurun. Sebaliknya, jika kenaikan upah lebih tinggi dibandingkan inflasi, maka daya beli pekerja akan meningkat.

Dalam kaitannya dengan penyerapan tenaga kerja, perbedaan antara upah nominal dan riil menjadi penting dalam keputusan perusahaan. Perusahaan pada umumnya merespons kenaikan upah nominal karena berkaitan langsung dengan biaya produksi.

2.1.3 Teori Industri Pengolahan

Industri pengolahan merupakan sektor ekonomi yang memiliki peran penting dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Sektor ini mengubah bahan mentah atau bahan baku menjadi barang jadi maupun barang setengah jadi yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Aktivitas tersebut dilakukan melalui proses mekanis, kimiawi, maupun penggunaan tenaga kerja dan teknologi produksi. Keberadaan industri pengolahan tidak hanya meningkatkan output ekonomi, tetapi juga mendorong penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta perkembangan sektor ekonomi lainnya.

Teori industri pengolahan berkaitan erat dengan konsep industrialisasi. Industrialisasi dipandang sebagai proses transformasi struktur ekonomi dari sektor primer menuju sektor sekunder yang lebih modern dan produktif. Menurut (Kuznets

1973), industrialisasi merupakan tahapan penting dalam pembangunan ekonomi karena sektor industri mampu menciptakan produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan sektor tradisional. Peningkatan aktivitas industri akan memperbesar output produksi dan memperluas kesempatan kerja di suatu wilayah.

Teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh (Chenery & Elkington, 1979) juga menjelaskan bahwa perkembangan industri pengolahan menjadi indikator transformasi ekonomi suatu daerah. Semakin besar kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), maka struktur ekonomi daerah cenderung semakin maju. Hal ini terjadi karena sektor industri memiliki keterkaitan yang kuat dengan sektor lain, baik sebagai penyedia input maupun pengguna output produksi. PDRB industri pengolahan juga sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat aktivitas industri di suatu daerah. Semakin tinggi nilai PDRB industri pengolahan, maka menunjukkan semakin besar aktivitas produksi industri yang berlangsung. Kondisi tersebut dapat mendorong peningkatan permintaan tenaga kerja.

Berdasarkan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa industri pengolahan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi daerah karena mampu meningkatkan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, perkembangan sektor industri pengolahan diduga berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

2.1.4 Teori PDRB Industri Pengolahan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan dan aktivitas ekonomi suatu daerah. PDRB menunjukkan total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Dalam penelitian ini, PDRB yang digunakan berfokus pada sektor industri pengolahan karena sektor tersebut memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Teori (Beckhart 1936) menyatakan bahwa peningkatan permintaan agregat akan mendorong perusahaan meningkatkan output produksi. Ketika produksi meningkat, perusahaan membutuhkan tambahan tenaga kerja untuk mendukung proses produksi tersebut. Oleh karena itu, peningkatan PDRB industri pengolahan dapat memberikan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Daerah dengan nilai PDRB industri pengolahan yang tinggi umumnya memiliki tingkat produksi industri yang lebih besar sehingga kebutuhan tenaga kerja juga lebih tinggi dibandingkan daerah dengan aktivitas industri yang rendah.

Berdasarkan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa PDRB industri pengolahan memiliki hubungan erat dengan penyerapan tenaga kerja. Peningkatan PDRB industri pengolahan menunjukkan meningkatnya aktivitas produksi industri yang dapat mendorong perluasan kesempatan kerja. Oleh karena itu, PDRB industri

pengolahan diduga berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

2.1.5 Teori PDRB Industri Non Pengolahan

PDRB industri non pengolahan merupakan nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor ekonomi di luar industri pengolahan dalam suatu wilayah dan periode tertentu. Sektor ini mencakup berbagai lapangan usaha seperti pertanian, perdagangan, konstruksi, transportasi, jasa, informasi dan komunikasi, serta sektor ekonomi lainnya yang tidak termasuk kegiatan manufaktur atau pengolahan bahan baku menjadi barang jadi.

Teori struktur ekonomi yang dikemukakan oleh (Colin Clark 1940) menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi suatu daerah akan mengalami pergeseran dari sektor primer menuju sektor sekunder dan tersier. Dalam proses tersebut, sektor non pengolahan seperti perdagangan, transportasi, dan jasa akan berkembang seiring meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Pertumbuhan sektor non pengolahan dapat menciptakan peluang kerja baru karena sektor ini banyak membutuhkan tenaga kerja dalam kegiatan operasionalnya

Menurut (Arsyad t.t.), pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi oleh kemampuan setiap sektor dalam menciptakan output dan kesempatan kerja. Semakin besar kontribusi sektor non pengolahan terhadap PDRB daerah, maka semakin besar pula potensi sektor tersebut dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Akan

tetapi, pengaruhnya terhadap penyerapan tenaga kerja bergantung pada karakteristik masing-masing sektor

Dalam penelitian ini, PDRB industri non pengolahan digunakan untuk melihat pengaruh aktivitas ekonomi sektor selain industri pengolahan terhadap penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Peningkatan PDRB non pengolahan dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap penyerapan tenaga kerja tergantung pada struktur dan perkembangan sektor ekonomi di daerah tersebut.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel Utama	Hasil Penelitian
1.	Analisis Pengaruh Upah Minimum dan PDRB terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Bitung (Felber Lube, Josep Bintang Kalangi, dan Krest D. Tolosang, 2021)	Upah Minimum, PDRB, Penyerapan Tenaga Kerja	Upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bitung. Kenaikan upah dinilai meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan daya beli masyarakat sehingga mendorong peningkatan produksi perusahaan.
2.	Pengaruh PDRB dan Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Jawa Tengah (Pratama dan Nugroho, 2019)	PDRB Industri, Upah Minimum, Penyerapan Tenaga Kerja	PDRB sektor industri berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja,
3.	Pengaruh PDRB Sektor Industri terhadap Kesempatan Kerja di Jawa Barat (Nugraha, 2020)	PDRB Industri Pengolahan, Kesempatan Kerja	Peningkatan PDRB industri pengolahan meningkatkan kesempatan kerja karena bertambahnya kapasitas produksi industri.
4.	Pengaruh Sektor Non Industri terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia (Kurniawati dan Dewi, 2022)	PDRB Non Pengolahan, Penyerapan Tenaga Kerja	Sektor non pengolahan seperti perdagangan dan jasa memberikan kontribusi positif terhadap penyerapan tenaga kerja..
5.	Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Barat (Hidayat, 2019)	UMK, Penyerapan Tenaga Kerja	Kenaikan UMK yang terlalu tinggi dapat menurunkan penyerapan tenaga kerja karena perusahaan mengurangi jumlah pekerja untuk menekan biaya produksi.
6.	Pengaruh Upah Minimum dan Jumlah Industri terhadap	Investasi & Upah - Tenaga Kerja	Investasi (sebagai proksi industri) memiliki pengaruh

	Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan (Putri, R. & Kurniawan, H. 2021)		langsung yang kuat terhadap penyerapan tenaga kerja. Upah minimum hanya berpengaruh tidak langsung melalui biaya produksi.
7.	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Industri terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota (Lestari dan Prakoso, 2021)	Industri Pengolahan, Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja	Pertumbuhan industri pengolahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja daerah.
8.	Pengaruh Upah Minimum dan Inflasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia (Vicy Andriany, Sonya Aprimayana, dan Annisa Desfikasari, 2025)	Upah Minimum, Inflasi, Penyerapan Tenaga Kerja	Upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia periode 1993 - 2023.

2.3 Kerangka Pemikiran

Upah minimum adalah kebijakan pemerintah yang menetapkan batas upah terendah yang harus dibayarkan perusahaan kepada pekerjanya untuk melindungi mereka dari upah yang tidak layak. Menurut N. Gregory Mankiw dalam *Principles of Economics*, dalam pasar tenaga kerja yang kompetitif perusahaan akan mempekerjakan tenaga kerja hingga nilai produk marjinal tenaga kerja sama dengan tingkat upah yang dibayarkan (Mankiw, 2012). Ketika tingkat upah meningkat, biaya produksi perusahaan juga meningkat sehingga perusahaan dapat mengurangi jumlah tenaga kerja yang digunakan. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam mempekerjakan tenaga

kerja. Jika tingkat upah meningkat melebihi produktivitas tenaga kerja, perusahaan dapat melakukan efisiensi tenaga kerja untuk menjaga keseimbangan biaya produksi. Namun, dalam kondisi industri yang produktif dan berkembang, peningkatan upah tidak selalu menurunkan penyerapan tenaga kerja karena perusahaan masih membutuhkan tenaga kerja untuk mempertahankan kapasitas produksi. Penelitian yang dilakukan oleh Aris Ananta dan rekan-rekannya juga menunjukkan bahwa kebijakan upah minimum dapat memengaruhi kondisi pasar tenaga kerja, terutama pada sektor industri yang sensitif terhadap perubahan biaya tenaga kerja (Guilmoto 2017)

PDRB Industri pengolahan biasanya diikuti dengan peningkatan kebutuhan tenaga kerja untuk menjalankan proses produksi. Menurut Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith dalam buku *Pembangunan Ekonomi*, pertumbuhan sektor industri memiliki peran penting dalam menciptakan kesempatan kerja karena sektor ini mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan mendorong perkembangan sektor ekonomi lainnya (Todaro & Smith, 2015). Selain itu, Lincolin Arsyad dalam *Ekonomi Pembangunan* menjelaskan bahwa perkembangan industri di suatu daerah dapat meningkatkan kesempatan kerja melalui perluasan kapasitas produksi dan peningkatan investasi (Arsyad, 2015). Ketika industri pengolahan meningkat, permintaan terhadap tenaga kerja juga cenderung meningkat karena perusahaan membutuhkan tenaga kerja untuk mengoperasikan kegiatan produksi.

PDRB industri non pengolahan juga memiliki keterkaitan dengan penyerapan tenaga kerja pada industri pengolahan. Menurut teori pertumbuhan ekonomi regional

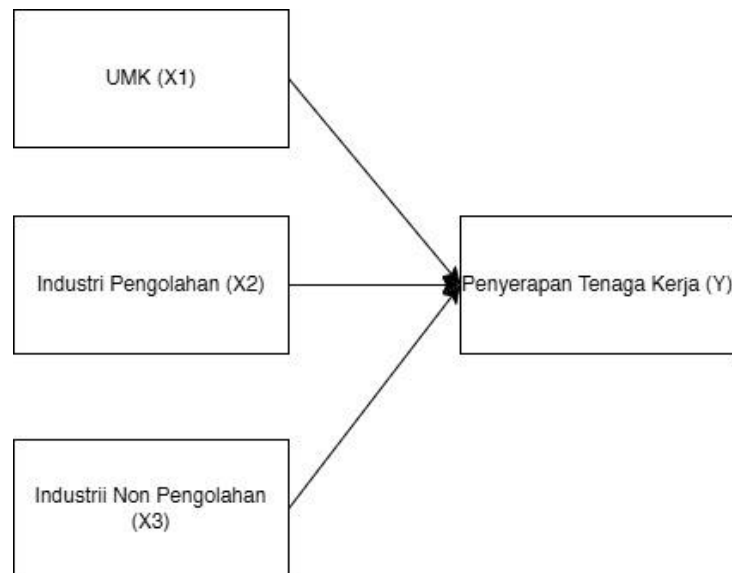
yang dikemukakan oleh (Richardson, P.L.&others. (1978). Lifelong learning and public policy.WashingtonD.C.U.S.Government Printing Office. - References - Scientific Research Publishing t.t.), perkembangan sektor-sektor ekonomi di suatu wilayah menciptakan keterkaitan antarsektor (intersectoral linkages) yang dapat mendorong aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Peningkatan output pada sektor non pengolahan, seperti perdagangan, transportasi, konstruksi, pertanian, dan jasa lainnya, akan meningkatkan permintaan terhadap barang hasil industri pengolahan sebagai input maupun barang konsumsi. Kondisi tersebut mendorong perusahaan industri pengolahan untuk meningkatkan kapasitas produksi sehingga kebutuhan tenaga kerja juga meningkat. Selain itu, teori keterkaitan sektor yang dikembangkan oleh (durongkaveroj 2019) menjelaskan bahwa pertumbuhan suatu sektor dapat menimbulkan efek pengganda terhadap sektor lain melalui hubungan ke belakang dan hubungan ke depan. Oleh karena itu, semakin tinggi PDRB industri non pengolahan di suatu daerah, semakin besar pula potensi peningkatan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan karena adanya dukungan aktivitas ekonomi yang saling terkait.

Penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Kemampuan suatu sektor ekonomi untuk menyerap tenaga kerja menunjukkan sejauh mana sektor tersebut mampu menyediakan peningkatan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan. Industri Pengolahan sering dianggap sebagai sektor strategis dalam konteks pembangunan

daerah karena memiliki kemampuan untuk menciptakan nilai tambah dan menciptakan banyak lapangan kerja. Menurut Sadono Sukirno dalam buku *Mikroekonomi Teori Pengantar*, permintaan tenaga kerja merupakan permintaan turunan yang muncul karena adanya kebutuhan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa (Sukirno, 2016). Artinya, tenaga kerja akan terserap apabila perusahaan melakukan aktivitas produksi. Ketika kegiatan produksi meningkat, perusahaan membutuhkan lebih banyak faktor produksi termasuk tenaga kerja. Berbagai faktor ekonomi, termasuk tingkat upah dan industri pengolahan yang beroperasi di suatu wilayah, memengaruhi penyerapan tenaga kerja dalam industri pengolahan. Kedua faktor ini memiliki hubungan langsung dengan keputusan yang dibuat oleh perusahaan mengenai penggunaan tenaga kerja.

Berdasarkan teori pasar tenaga kerja dan teori permintaan tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja dalam sektor industri dipengaruhi oleh faktor biaya tenaga kerja dan kapasitas produksi industri. Upah minimum mencerminkan biaya tenaga kerja yang harus ditanggung perusahaan, sedangkan industri pengolahan mencerminkan kapasitas produksi yang tersedia dalam suatu wilayah. Dalam konteks industri pengolahan di Provinsi Jawa Barat, hubungan antara kedua variabel tersebut menjadi penting untuk dianalisis. Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan konsentrasi industri pengolahan terbesar di Indonesia. Banyaknya kawasan industri dan perusahaan pengolahan menjadikan provinsi ini sebagai pusat kegiatan industri nasional. Ketika industri pengolahan meningkat, kesempatan kerja bagi masyarakat juga berpotensi meningkat karena perusahaan membutuhkan tenaga kerja dalam proses produksi.

Namun, peningkatan upah minimum juga dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam mempekerjakan tenaga kerja karena upah merupakan bagian dari biaya produksi. Dengan demikian, hubungan antara upah minimum dan industri pengolahan terhadap penyerapan tenaga kerja perlu dianalisis secara empiris untuk mengetahui bagaimana kedua faktor tersebut memengaruhi kondisi pasar tenaga kerja di sektor industri pengolahan di Provinsi Jawa Barat.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Kerangka penelitian diatas menggambarkan variabel Upah Minimum Kab/Kota (UMK), PDRB Industri pengolahan, dan PDRB Indsutri Non Pengolahan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja. Karena gambar diatas menunjukan sebab-akibat antara variabel independent dan dependent. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel independent terhadap variabel dependen

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis Penelitian merupakan dugaan penelitian penulis yang sedang di kaji. Akan tetapi belum terbukti kebenarannya. Hipotesis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Upah Minimum Kab/Kota (UMK), Industri Pengolahan , terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Barat .

1. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat.
2. PDRB Industri pengolahan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat.
3. PDRB Industri non pengolahan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat.
4. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) PDRB industri pengolahan, dan PDRB industri non pengolahan secara simultan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat.

